

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mengikuti Ujian Oral Comprehensive  
Dalam Meraih Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**INDRA RUKMANA**

**NIM. 10873003249**

**JURUSAN AKUNTANSI SI  
KONSENTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
1433 H/2013**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAHAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**



**Oleh**

**INDRA RUKMANA**

**NIM. 10873003249**

**JURUSAN AKUNTANSI SI**

**KONSENTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**1433 H/2013**

**ABSTRAK**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN  
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN  
BUNGARAYA KABUPATEN SIAK**

**OLEH : INDRA RUKMANA  
NIM : 10873003249**

*Penelitian ini dilakukan pada kantor Kecamatan Bungaraya yang berlangsung pada bulan Desember 2012 sampai bulan April 2013. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris apakah kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar wajib pajak mempengaruhi jumlah tunggakan Pajak bumi dan bangunan. Pengukuran faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan Pajak bumi dan bangunan menggunakan instrument kuesioner.*

*Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Untuk mengetahui besarnya hubungan variabel independen terhadap variabel dependen digunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS dengan hasil penelitian bahwa faktor kesadaran diperoleh  $t$  hitung sebesar 3.698, faktor kelalaian diperoleh  $t$  hitung sebesar 4.904, faktor pelayanan diperoleh  $t$  hitung sebesar 4.229, faktor pengetahuan diperoleh  $t$  hitung sebesar 3.252, faktor sanksi diperoleh  $t$  hitung sebesar 2.436 dan faktor kemampuan untuk membayar diperoleh  $t$  hitung sebesar 2.573 dengan nilai  $t$  table sebesar 1.975. dapat disimpulkan bahwa semua variabel berpengaruh positif terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.*

*Sedangkan secara simultan keenam variabel kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, dapat dilihat dari hasil SPSS  $f$  hitung  $59.407 > f$  tabel 2.14. Dan dari hasil pengolahan data diperoleh  $r$  dan  $r$  squared sebesar 0,626 artinya 62.6%, sedangkan sisanya sebesar 37,4% dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti faktor jarak tempat tinggal, faktor korupsi yang dilakukan oleh pegawai pajak, faktor pendidikan dan yang lainnya.*

**Kata kunci :** *Jumlah tunggakan Pajak bumi dan bangunan kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar*

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian .....	5
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.5. Sistematika Penulisan .....	6

### BAB II KAJIAN TEORI

2.1. Pengertian Pajak .....	8
2.1.1. Pengelompokan Pajak .....	9
2.1.2. Fungsi Pajak .....	12
2.1.3. Jenis Pajak .....	13
2.1.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	15
2.1.5. Cara Pengenaan Pajak .....	17
2.1.6. Dasar Pengeran Pajak .....	18
2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak .....	19
2.1.8. System Pemungutan Pajak .....	20
2.2. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan .....	25
2.2.1. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan .....	26
2.2.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan .....	28
2.2.3. Klasifikasi Bumi dan Bangunan .....	29
2.3. Pengertian Tunggakan .....	30

2.4. Pajak dalam Pandangan Islam .....	31
2.5. Penelitian Terdahulu.....	32
2.6. Pengembangan Hipotesis.....	35
2.7. Model Penelitian.....	42
2.8. Hipotesis .....	42

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Lokasi Penelitian .....	44
3.2. Populasi dan Sampel.....	44
3.3. Jenis Penelitian dan Sumber Data .....	47
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.5. Definisi Variable dan Pengukuran Variable.....	48
3.5.1. Variable Dependen .....	48
3.5.2. Variabel Independen.....	49
3.6. Metode Analisis Data .....	51
3.6.1. Uji Validitas dan Reabilitas .....	51
3.6.2. Uji Asumsi Klasik.....	52
3.6.3. Uji Hipotesis .....	54

### **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

4.1. Karakteristik .....	57
4.2. Keadaan Demokrasi.....	58
4.3. Struktur Pemerintahan .....	60
4.4. Tugas dan Fungsi Camat .....	61
4.5. Tugas dan Fungsi Perangkat Kecamatan.....	62
4.5.1. Sekretaris Camat.....	62
4.5.2. Seksi Tata Usaha.....	63
4.5.3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat .....	64
4.5.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban .....	66
4.5.5. Seksi Kesejahteraan Sosial .....	67

## **BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN**

5.1. Kuesioner dan Demografi .....	68
5.2. Analisis Data Statistik Deskriptif Variable .....	69
5.3. Analisis Data .....	71
5.4. Uji Asumsi Klasik .....	77
5.4.1. Uji Normalitas .....	77
5.4.2. Uji Autokorelasi.....	79
5.4.3. Uji Heteroskedastisitas .....	80
5.4.4. Uji Multikolonearitas .....	82
5.5. Analisis Hasil Regresi .....	83
5.5.1. Uji Persial .....	85
5.5.2. Uji Simultan.....	90
5.5.3. Koefesien Determinasi.....	91

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

6.1. Kesimpulan .....	92
6.2. Saran .....	94

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

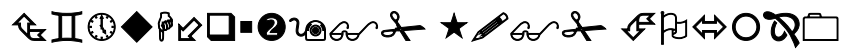
Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan PBB .....	3
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin .....	58
Tabel IV.2	Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian .....	59
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Faktor Agama .....	60
Tabel V.1	Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	68
Tabel v.2	Demografi Responden .....	69
Tabel V.3	Hasil Uji Ststistik Deskriptif.....	70
Tabel V.4	Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran .....	72
Tabel V.5	Hasil Uji Validitas Variabel Kelalaian .....	73
Tabel V.6	Hasil Uji Validitas Variabel Pelayanan .....	73
Tabel V.7	Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan .....	74
Tabel V.8	Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi .....	75
Tabel V.9	Hasil Uji Validitas Variabel Kemampuan .....	75
Tabel V.10	Hasil Uji Reliabilitas Tunggalan PBB .....	76
Tabel V.11	Hasil Uji Normalitas .....	77
Tabel V.12	Hasil Uji Autokorelasi .....	79
Tabel V.13	Hasil Uji Multikonearitas .....	82
Tabel V.14	Hasil Regresi Linier Berganda.....	83
Tabel V.15	Hasil Uji Regresi Secara Persial .....	86
Tabel V.16	Hasil Uji F Hitung .....	90
Tabel V.17	Hasil Koefisien Determinasi .....	91

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Model Penelitian .....	42
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Kecamatan Bungaraya .....	61
Gambar V.1	Diagram P-P Plot Normalitas.....	78
Gambar V.2	Diagram Scetterplot Heterokedastisitas .....	81



## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb**

Segala puji syukur hanya kepada Illahi Robbi, yang dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan segenap pengikutnya hingga akhir kelak.

Merupakan suatu ketenangan dan kebahagiaan bagi penulis, ketika penulis mamapu mencurahkan segenap tenaga, kemampuan dan dana untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon kepada Allah SWT semoga hasil karya tulis ini memberikan mamfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

Penulis menyadari dalam pembuatan Skripsi ini masih banyak kesalahan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Hal ini tidak lain dikarenakan keterbatasan kemampuan ,keterbatasan cakrawala berfikir penulis serta keterbatasan waktu dan tempat. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat dan ikut menyumbangkan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Oleh karena itu dengan segala kerandahan hati penulis bersedia menerima kritik dan saran dari pembaca yang berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Dengan menggunakan kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda Misman dan Ibunda Salmiah yang tersayang dan tercinta, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Do'a yang tulus demi penyelesaian skripsi ini. Serta buat abangku Joni serta adik-adikku Putra dan Nur Viana yang tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Nazir MA, selaku Rektor dan para staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
3. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan seluruh Bapak-bapak pembantu Dekan serta Bapak-bapak/Ibu tenaga Administratif lainnya.
4. Bapak Dony Martias, SE, MM dan Ibu Desril Miftah, SE, MM, Ak selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi dan karyawan/i (segenap Akademik) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang selalu sabar dalam mengurus kepentingan Mahasiswa selama mengikuti masa perkuliahan.
5. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis selama penulis mengikuti masa perkuliahan.
6. Bapak Andri Novius, SE, M.Si, Ak selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis demi penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Desrir Mifta, SE, MM, Ak, Sekretari Jurusan Akuntansi SI terimakasih atas bantuannya.

8. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bias menjadi seperti sekarang ini.
9. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Siak beserta pegawainya. Terima kasih atas waktu, kesempatan serta bantuan sehingga penulis bisa melaksanakan penelitian ini.
10. Buat adikku tercinta Sri Ayu Wulandari terimakasih telah memberikan semangat dan selalu menghibur dikala penulis mengalami kesulitan dalam pembuatan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat, Darmawi, Adi, Samsul, Novi, Khadijah, Titik, Mitha dan teman-teman lokal Akuntansi A angkatan 2008, lokal Konsentrasi Pajak yang telah memberikan semangat dan memotifasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini
12. buat temanku Rosyidi, Iskandar dan Heri terimakasih atas dukungan dan motifasinya. Semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Sukron atas semuanya, semoga menjadi orang yang bermanfaat dan sukses selalu

**Amin.....**

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka.  
Billahitaufiq Walhiddayah,  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru 15 April 2013

Penulis,

**INDRA RUKMANA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Mekanisme perpajakan adalah cara pokok bagi pemerintahan manapun untuk membangun sumberdaya guna menjamin berlangsungnya pemerintahan dan program pembangunan yang dijalankannya. Pembangunan disini maksudnya adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan akhirnya.( Sondang Siagaan, 2005 : 5 )

Penerimaan pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara karena besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan disektor migas sesuai dengan hukum alam jika eksploitasikan secara terus menerus cenderung akan berkurang dan nantinya akan habis.

Adapun pajak dipungut tanpa harus membebani masyarakat dan adil dalam pelaksanaannya. Adapun masalah pajak yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "pengenaan dan pemungutan pajak (termaksud bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Peranan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan amatlah besar. Adapun faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kesadaran sehingga dengan lemahnya tingkat kesadaran masyarakat, di mana perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara melalui pembangunan.

Pada dasarnya masalah kelalaian juga berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, banyaknya masyarakat yang enggan dan bahkan tidak mau tahu tentang arti penting membayar pajak dalam hal ini akan menghambat program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Lemahnya sanksi, tingkat pendidikan, kemampuan wajib pajak untuk membayar serta pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak juga merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Untuk lebih tertib dalam usaha pemungutan pajak bumi dan bangunan maka pemerintah Kabupaten Siak telah menunjuk dinas pendapatan daerah (DISPENDA) sebagai instansi pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Sedangkan untuk Kecamatan Bungaraya yang melakukan pemugutan pajak adalah unit pelaksanaan teknis dinas (UPTD) Kecamatan Bungaraya.

Berdasarkan hasil pendapatan pajak bumi dan bangunan Kecamatan Bungaraya yang diterima oleh kantor Dispenda Kabupaten Siak tahun 2010 sampai 2011.

**Tabel 1.1**  
**Target Dan Realisasi Penerimaan PBB di Kecamatan Bungaraya**  
**Kabupaten Siak Tahun 2010-2011**

No	TAHUN	KETETAPAN		REALISASI		Persentase (%)
		Wp	Target (Rp)	Wp	Setoran (Rp)	
1	2010	6.877	117.809.445	2.799	46.582.118	39,54
2	2011	6.900	118.320.131	2.473	45.360.628	38,34

*Sumber Data: Kantor Dispenda Kabupaten Siak*

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah tunggakan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2010 sampai 2011 mengalami peningkatan hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bungaraya kabupaten siak masih rendah.

Hal ini terlihat secara merata dari partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak terutama pajak bumi dan bangunan masih sangat lemah, oleh karena itu diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran berpartisipasi yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak terutama pajak bumi dan bangunan. partisipasi seseorang dalam memenuhi kewajiban pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain kesadaran, kalalaian, pelayanan, pengetahuan, lemahnya sanksi dan kemampuan untuk membayar pajak itu sendiri.

Partisipasi masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan perlu adanya peningkatan baik dalam tingkat Partisipasi masyarakat, Pelayanan Jasa serta prosedur perpajakan terus di sempurnakan dan aparat perpajakan makin di arahkan agar dapat mendorong pendayagunaan dan pengembangan daerah.

Penelitian ini menggabungkan penelitian-penelitian terdahulu, yang merupakan pengkajian ulang terhadap penelitian Suhaini (2010). Namun, pada penelitian ini menambahkan dua faktor yaitu faktor pengetahuan dan sanksi, yang mana untuk membuktikan apakah kedua faktor ini juga berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan dikecamatan bungaraya kabupaten siak .

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak“**

## **1.2. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor kesadaran berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Apakah faktor kelalaian berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

3. Apakah faktor pelayanan jasa berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. Apakah faktor pengetahuan berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. Apakah faktor sanksi berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
6. Apakah faktor kemampuan untuk membayar berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
7. Apakah faktor Kesadaran, Kelalaian, Pelayanan, Pengetahuan, Sanksi, dan Kemampuan untuk membayar secara bersama-sama berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kelalaian wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
3. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara pelayanan pegawai pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
4. untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara pengetahuan wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
5. untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara lemahnya sanksi pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.



6. untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh antara kemampuan untuk membayar wajib pajak terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.
7. Untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh Kesadaran, Kelalaian, Pelayanan, Pengetahuan, Sanksi, dan Kemampuan untuk membayar terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh apabila penelitian dapat tercapai yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan dalam masalah pajak bumi dan bangunan
2. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang cara dan prosedur pemunguan pajak bumi dan bangunan
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah perbendaharaan penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yang akan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN TEORI**

Bab ini berisikan telaah pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut reprints-reprints dan buku-buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu pengertian pajak, pengertian pajak bumi dan bangunan, pengertian tunggakan, pajak dalam pandangan Islam, model penelitian, hipotesis dan variabel penelitian

## **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari populasi, sampel penelitian, jenis dan sumber data. Variabel dan pengukurannya, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan sejarah Kecamatan bungaraya Kabupaten siak, Penduduk, sosial, Geografis dan Monografis Kabupaten siak.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan.

## **BAB VI : PENUTUP**

Ada bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi objek penelitian agar bisa lebih baik lagi kedepannya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1. Pengertian Pajak**

Dalam pengertian secara umum, pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. (Mardiasmo : 2009).

Pajak menurut P.J.A Andriani (dalam buku Bohari 2010 : 23) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak pembayarannya menurut peraturan-peraturan dan tidak dapat prestasi yang dapat ditunjuk yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah

Senada dengan itu Siti (Resmi, Siti. 2005 : 2) dalam bukunya berjudul Perpajakan: Teori Dan Kasus, mengatakan pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dimana diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai Public Investment.

Menurut Prof.Rochmat Soemitro,SH dalam Sri Pudjarmoko (2002 : 20) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut pendapat R. Santoso Brotodiharjo (dalam Waluyo :2011 : 2) pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Muda Markus (2005 : 1) pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapatkan kontraprestasi secara inivididu dan langsung dari negara .

Dari pengertian-pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur pajak adalah :

1. Iuran masyarakat kepada negara, dimana swasta atau pihak lain tidak boleh memungut
2. Berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dimana mempunyai kekuatan hukum.
3. Tanpa balas jasa (prestasi) dari negara yang dapat langsung ditunjuk.
4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

#### **2.1.1. Pengelompokan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2009 : 5) pajak dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemugutnya :

## 1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung

### 1. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

### 2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

### 1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak dengan memperhatikan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan

## 2. Pajak obyektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak pertambahan nilai (PPn) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

## 3. Menurut Lembaga Pemungut

### 1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak negara atau pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Adapun pajak pusat terdiri dari :

- a. Pajak penghasilan (pph)
- b. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)
- c. Bea materai
- d. Pajak bumi dan bangunan (PBB)
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- f. Bea masuk

### 2. Pajak daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. terdiri dari :

a. Pajak daerah TK I (Propinsi),

contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b. Pajak Daerah TK II (kotamadya/kabupaten),

contoh : Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan.

### **2.1.2. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak lebih kepada manfaat pokok atau kegunaan pokok dari pajak itu sendiri, pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai APBN, maka beberapa fungsi pajak antara lain:

#### **1. Fungsi Budgetair (Anggaran)**

Menurut Waluyo Wirawan (2002 : 15) Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan di tunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.

Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus, penerimaan/rutin biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, bea dan cukai, hasil perusahaan negara denda dan sitaan.

Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah, seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos

pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran utang-utang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

## 2. Fungsi Regulerend (Fungsi Mengatur)

Fungsi mengatur ini berarti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

## 3. Fungsi Stabilitas

yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan dengan mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

## 4. Fungsi retribusi pendapatan,

pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.

### 2.1.3. Jenis Pajak

Berikut ini ada beberapa jenis pajak yang terdapat di indonesia, baik yang sudah tidak berlaku lagi maupun yang sedang berlaku saat ini (Markus,2005 : 3):

#### 1. Pajak pusat (wewenang pemajakan berada ditangan pemerintah pusat)

Terdiri dari:



- a. Pajak Penghasilan (pph) ; Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan UU No.7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No.17 Tahun 2000.
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ; Dasar hukum pengenaan pajak PPn dan PPnBm adalah UU No.8 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan UU No.18 Tahun 2000.
  - c. Bea Materai ; Dasar hukum bea materai adalah UU No.13 Tahun 1985.
  - d. Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) ; Dasar hukum UU No.12 Tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994
  - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan ; Dasar hukum UU No.21 Tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2000.
  - f. Bea Masuk ; Berdasarkan UU No.10 Tahun 1995 tentang kepabean.
2. Pajak daerah (wewenang pemajakan berada ditangan pemerintah daerah)
- Pajak daerah terdiri dari 2 bagian
- a. Pajak propinsi yang terdiri dari :
    - 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan atas air
    - 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

- 3) Pajak bahanbakar kendaraan bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan di atas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga atau pertanian rakyat.

b. Pajak kabupaten kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel juga termaksud fasilitas lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. Kecuali untuk pertokohan dan perkantoran
- 2) Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran
- 3) Pajak hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan
- 4) Pajak reklame pajak yang dikenakan atas pertelenggaran reklame
- 5) Pajak peneranganjalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik
- 6) Pajak penngambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan.

#### **2.1.4. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Asas-asas *principle* adalah suatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan.

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan Pajak.

W.J de Langen seorang ahli pajak kebangsaan belanda (dalam Bohari, 2010 : 42) menyebutkan 7 asas pokok perpajakan adalah sebagai berikut:

1. *Asas kesamaan*, dalam arti bahwa seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya di kenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.
2. *Asas daya pikul*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dan dibawah dibebaskan dari pajak.
3. *Asas keuntungan istimewa*, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula.
4. *Asas manfaat*, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang di sediakan oleh pemerintah.
5. *Asas kesejahteraan*, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan pada lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintahan tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. *Asas keringanan beban*, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan berapapun tingginya kesadaran berwarga negara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya.
7. *Asas keseimbangan*, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu di usahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu pelaksanaan hukum, perasaan dan kepastian hukum.

#### **2.1.5. Cara Pengenaan Pajak**

Cara Pengenaan Pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan sistem pemungutan berdasarkan atas stelsel-stelsel yaitu:

1. *Stelsel Nyata (Riel Stelsel)* Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.
2. *Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)* Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, hal ini dimungkin untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan pendapatan atau pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dan pendapatan yang akan diperoleh pada tahun sekarang.

3. Stelsel Campuran Stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

#### **2.1.6. Dasar Pengenaan Pajak**

1. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak (NJOP)
2. Besarnya nilai jual objek pajak ditetapkan 3 tahun oleh kepala kantor wilayah dirjen pajak atas nama menteri keuangan dengan mempertimbangkan pendapat gubernur/bupati/walikota (pemerintah daerah setempat). Namun demikian pada daerah-daerah tertentu ditetapkan setiap setahun sekali sesuai dengan perkembangan pembangunan.
3. Besar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP.
4. Besarnya presentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.

Pada dasarnya penetapan NJOP adalah tiga tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar angka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Untuk perekonomian sekarang ini terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan tetapi dengan tetap

memperhatikan penerimaan, khususnya bagi pemerintah daerah maka telah ditetapkan besarnya presentase untuk menentukan besarnya NJKP yaitu:

1. Sebesar 40% pajak perkebunan :
  - a. Objek pajak kehutanan
  - b. Objek pajak kehutan
  - c. Objek pajak lainnya yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk :
  - a. Objek pajak pertambangan
  - b. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

#### **2.1.7. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, dengan kata lain untuk mencapai tujuan maka pemungutan pajak perlu memegang teguh atas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Asas-asas pemungutan pajak sebagai mana dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya yang berjudul “*An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations*” (Waluyo, 2007: 13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :

- a. Equaliti ( Persamaan )

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan pada orang-orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan

membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. Certainty ( Kepastian)

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang, oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang , kapan harus dibayar dan kapan batas waktu pembayaran.

c. Convenience ( Menyenangkan )

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaliknya sesuai dengan pada saat tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh saat wajib pajak memperoleh penghasilan.

d. Ekonomi ( Ekonomi )

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin , demikian pula beban yang dipikul oleh wajib pajak.

#### **2.1.8. Sistem Pemungutan Pajak**

Ketentuan yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan indonesia dengan jelas menentukan bahwa sistem pepajakan indonesia adalah sistem self assessment. Dan hal ini telah diberlakukan sejak reformasi perpajakan indonesia tahun 1983. Pemungutan sistem ini juga dianut dalam undang-undang No.18 Tahun 1987 dan undang-undang No.34 Tahun 2000. Karena karakteristik setiap jenis setip daerah tidak sama, sistem ini tidak dapat diperlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan

pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagai mana tercantum dibawah ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak,sistem ini merupakan perwujudan dari sisem self assessment,yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh kepala daerah,sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment,yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disempurnakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak .sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with hollding,yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya,antara lain (PLN)yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah.

Secara umum,sistem yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah adalah sistem self assessment dan official assessment.hal ini terdapat dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 7,bahwa pajak dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.Untuk pemungutan pajak dipakai sistem self assessment yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.



Tata cara pembayaran dan penagihan berdasarkan undang-undang yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak

Contoh : Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 april 2005, maka jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 30 september 2005.

- b. Pajak yang terutang berdasarkan surat keterangan pajak (SKP) harus dilunasi selambat-lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Contoh : Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 maret 2005, maka jatuh tempo pengambilannya adalah tanggal 31 maret 2005.

- c. pajak yang terutang yang ada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- d. denda administrasi sebagaimana ditambahkan dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar, ditagih dengan surat tagihan pajak SPT yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SPT oleh wajib pajak.

- e. Pajak yang terutang dapat dibayara dibank,kantor Pos dan Giro,dan tempat lailn yang ditunjukan oleh mentri keuangan.
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh mentri keuangan.
- g. SPTT,surat ketetapan pajak,STP merupakan dasar penagihan pajak.
- h. Jumlah pajak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Selanjutnya Sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi dalam PBB meliputi kondisi sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPOP walaupun telah ditegur secara tertulis,dikenakan sanksi administrsi berupa denda sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.
- b. Wajib pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP,maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari selisih pajak yang terutang.
- c. Wajib pajak tidak membayar atau kurang membayar.pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran,dikenakan sanksi adminisrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat

jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana diatur sebagai berikut:

### a. Barang siapa karena kelupaannya:

- 1) tidak mengembalikan atau atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jenderal pajak
- 2) menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan yang tidak benar Sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar dua kali pajak yang terutang.

### b. Barang siapa dengan sengaja

- 1) tidak mengembalikan atau menyampaikan SPOP kepada direktorat jenderal pajak
- 2) menyampaikan SPOP, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan atau melampirkan keterangan tidak benar
- 3) memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar
- 4) tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya
- 5) tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. Sehingga menimbulkan kerugian pada negara

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar lima kali pajak yang terutang.

- c. Terhadap kategori bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan dokumen atau surat lainnya dan tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan. dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000. (perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Waluyo 2007;151-152).

## **2.2. Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat sedangkan untuk daerah dan sebagian lagi untuk pemerintah pusat yang dibagi melalui kas negara. yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tak bergerak, maka oleh sebab itu keadaan dan status orang, badan yang dijadikan subjek tidak penting atau tidak mempengaruhi besarnya pajak.

Menurut Achmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi (2003 : 345) yang dimaksud pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang no 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan,

menerangkan bahwa Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010 : 273) menyatakan pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang ada dibawahnya, permukaan bumi yang meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut wilayah indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan perairan untuk tempat tinggal,tempat usaha atau tempat yang diusahakan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan bangunan dikenakan terhadap subjek pihak orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai hak atau memperoleh manfaat atas bumi ,dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

### **2.2.1. Objek Dan Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan**

#### **1. Objek Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan UU No.12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan,yang menjadi objek pajak ialah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi atau tubuh bumi yang dibawahnya, permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah republik indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha atau tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan disini adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- b. Jalan Tol
- c. Kolam Renang
- d. Pagar Mewah
- e. Tempat Olahraga
- f. Galangan Kapal, Dermaga
- g. Taman Mewah
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

## 2. Subjek Pajak Bumi Dan Bangunan

Sedangkan subjek pajak bumi dan bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam kaitannya dengan hal ini maka yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang atau badan adalah:

- a. mempunyai hak atas bumi
- b. memperoleh manfaat atas bumi
- c. memiliki atau menguasai atas bangunan
- d. memperoleh manfaat atas bangunan.

Dengan demikian dapat ditegaskan, subjek pajak bumi dan bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian UU No.12 tahun 1994 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak

### **2.2.2. Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib masyarakat. Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi pelaksanaan hukum dapat dipaksakan. Adapun dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 Tahun 1994.
- b. Peraturan pemerintah No.46 tahun 1985 tentang presentase nilai jual kena pajak pada pajak bumi dan bangunan.
- c. Keputusan menteri keuangan No.1002/KMK.04/1985 tentang tata cara pendaftaran objek PBB.
- d. Keputusan menteri keuangan No.1003/KMK 04/1985 tentang penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek sebagai dasar pengenaan objek PBB.
- e. Keputusan menteri keuangan No.1006/KMK 04/1985 tentang tata cara penagihan PBB dan penunjukan pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
- f. Keputusan menteri keuangan No.1007/KMK 04/1985 tentang pelimpahan wewenang penagihan pajak bumi dan bangunan kepada gubernur kepala daerah tingkat I /bupati/wali kota madya kepala daerah tingkat II

- g. Keputusan gubernur DKI Jakarta No.816 tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di wilayah DKI Jakarta.

### **2.2.3. Klasifikasi Bumi Dan Bangunan**

Klasifikasi pajak adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan yang terutang. Adapun faktor-faktor yang menentukan klasifikasi objek adalah sebagai berikut:

1. Bumi / Tanah
  - a. Letak
  - b. Peruntukan
  - c. Pemanfaatan
  - d. Kondisi lingkungan
  - e. Dan lain-lain
2. Bangunan
  - a. bahan bangunan
  - b. rekayasa
  - c. letak
  - d. kondisi lingkungan
  - e. dan lain-lain.



### 2.3. Pengertian Tunggakan

Pajak terutang oleh wajib pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran harus dilakukan di Kas Negara atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingankan wajib pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Sedangkan pengertian tunggakan di dalam Kamus Bahasa Indonesia (2005) yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.

Menurut prof.w.j.de langen yang dikutip oleh bohari (2006) yang menjadi kendala dalam pemungutan pajak yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor kesadaran, kelalain, Pelayanan jasa, pemahanan, sanksi dan Kemampuan untuk membayar.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila wajib pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur dan ditagih.

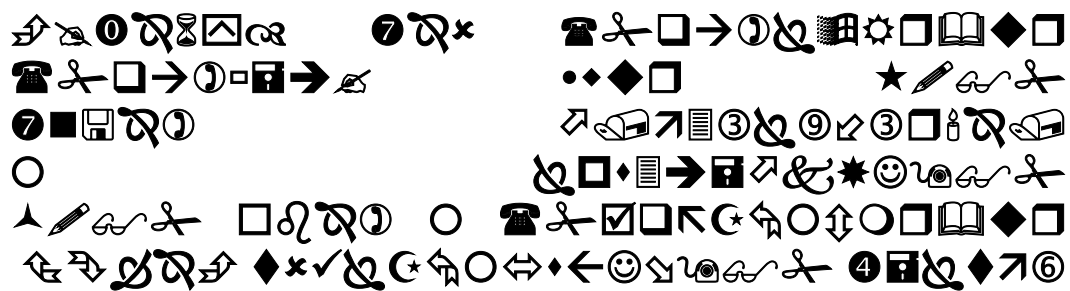
Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat di sertakan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan masyarakat dengan melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk masa berikutnya



sektor kehidupan yang diuthkan oleh masyarakat secara luas, seperti sarana dan pra sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

Alasan kaum muslim menunaikan Pajak yang ditetapkan negara, disamping penunaian kewajiban Zakat, antara lain solidaritas dan tolong menolong. Sesama kaum muslim dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus terpenuhi.

Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah:195



Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Atas alasan diatas, maka sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum muslim (terutama kaum muslim di Indonesia), yaitu kewajiban dalam menunaikan Zakat dan Pajak sekaligus.

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Suhaeni (2010) melakukan penelitian tentang *faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota*

*Pekanbaru*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kesadaran, pendapatan, kemauan membayar pajak dan pelayanan jasa, berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Taufik (2009) melakukan penelitian tentang *Analisis partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Rokan Hilir* dengan hasil menunjukkan bahwa faktor tingkat pendidikan, pendapatan dan pelayanan jasa, berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sedangkan jarak tempat tinggal tidak berpengaruh.

Yeni apryana (2011) melakukan penelitian tentang *faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari empat faktor yaitu faktor pengetahuan, tarif pajak, hukum dan sanksi serta partisipasi masyarakat dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Zameira Saputri (2008) meneliti tentang *faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan rupa kabupaten bengkalis*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat tiga faktor yaitu faktor pengetahuan, tarif pajak serta hukum dan sanksi, ketiga faktor yang menjadi masalah penelitian dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

Pardi (2009) meneliti tentang *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban wajib pajak bumi dan bangunan di Surakarta*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari lima faktor yaitu pengetahuan wajib pajak, pelayanan jasa, sanksi, manfaat pajak bagi wajib pajak, serta manfaat pajak bagi wajib pajak secara simultan. Semua faktor yang menjadi masalah penelitian dinyatakan berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan.

Nila Yuliana Wati (2011) meneliti tentang *Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak*. Dari penelitian tersebut terdapat lima factor yaitu faktor kesadaran, pengetahuan, pemahaman, persepsi tentang system perpajakan serta pelayanan. Faktor kesadaran dan layanan dinyatakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sedangkan faktor pengetahuan, pemahaman serta persepsi tentang system perpajakan dinyatakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Merri Nugraheni (2010) melakukan peneliti tentang *faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari empat faktor yaitu kesadaran, pendapatan, jarak tempat tinggal dan pelayanan jasa, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor adalah faktor kesadaran dan pelayanan jasa. Sedangkan faktor pendapatan dan jarak tempat tinggal, tidak berpengaruh terhadap jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **2.6. Pengembangan Hipotesis**

Menurut Hoetomo (2005) Hipotesis penelitian adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau untuk mengutarakan pendapat meskipun kebenarannya belum dibuktikan. Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran Pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan tujuan penelitian serta di hubungkan dengan teori-teori yang relevan, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

### **1. Kesadaran**

Menurut Ernie Trisnawati Sule & Kurniawan Saefullah dalam buku pengantar manajemen (2005) Perilaku ini merujuk kepada tingkat keseriusan individu terhadap rencana pencapaian tujuan dari organisasi. Individu yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung akan memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan dan oleh karena kerjanya terorganisir dikarenakan perhatiannya tidak bercabang kemana-mana sebaiknya, individu yang tingkat kesadaran rendah maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang dan oleh karenanya kurang terorganisasi dan kurang fokus.

Rendahnya kesadaran masyarakat warga Negara untuk membayar pajak kepada Negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa Negara. Individu yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung akan memiliki perhatian yang serius terhadap pekerjaan dan oleh karena kerjanya terorganisir dikarenakan perhatiannya tidak bercabang kemana-mana sebaiknya, individu yang tingkat kesadaran rendah maka perhatiannya terhadap pekerjaan relatif kurang dan oleh karenanya kurang terorganisasi dan kurang fokus.

Pada hakikatnya kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam keadaan tahu, mengerti dan tidak merasa dipaksa ataupun takut dalam melaksanakan kewajibannya, karena adanya nilai-nilai hukum dalam diri wajib pajak dan adanya pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Irianto (2005:36) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, diantaranya :

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

b. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib Pajak adalah suatu sikap menyadari dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

**H1** : Diduga kesadaran berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **2. Kelalaian**

Kelalaian adalah Menolak pembayaran pajak yang ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Menurut Hoetomo (2005) dalam kamus besar bahasa Indonesia kelalaian berasal dari kata lalai yang berarti kurang hati-hati, tidak mengindahkan. Kelalaian ialah melakukan sesuatu dibawah standar yang ditetapkan oleh aturan atau hukum guna melindungi orang lain yang bertentangan dengan tindakan-tindakan yang tidak beralasan dan berisiko melakukan kesalahan.

Setiap warga Negara wajib memberikan sumbangan kepada Negara sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa masyarakat tidak boleh menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya.



**H2 :** Diduga Kelalaian berpengaruh terhadap tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan

### **3. Pelayanan jasa**

Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan (Boediono : 2003). Sedangkan Jasa adalah aktivitas, mamfaat dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, misalnya jasa pengacara, bengkel dll (Tjiptono : 2002).

Jasa atau pelayanan adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya bukan produk dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberi nilai tambah (seperti kenikmatan, hiburan, santai, dan sehat) bersifat tidak terwujud (Alma : 2002) menurut Alma pelayanan dibagi kedalam 3 bentuk kategori :

- a. Pelayanan dengan lisan
- b. Pelayanan dengan tulisan
- c. Pelayanan dengan perbuatan

Dengan urian diatas bahwa pelanggan hanya akan mau menggunakan jasa perusahaan apabila perusahaan yang melayani pelanggan itu dapat memberikan kepuasan dan nilai tepat waktu yang telah ditentukan dan terdapat pula kemudahannya. Supaya layanan dapat memuaskan pelanggan maka petugas yang melayani harus memenuhi empat kriteria pokok yaitu:

1. Tingkah laku yang sopan

2. Cara penyampaian sesuatu yang berkaitan dengan apa yang seharusnya
3. Diterima oleh orang yang bersangkutan

Tingkat pelayanan pajak bumi dan bangunan juga merupakan salah satu faktor yang merangsang wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, apabila wajib pajak mempunyai dasar atau pengalaman dalam membayar pajak dengan pelayanan yang baik, mudah dan aman, maka tingkat partisipasi dapat di pertahankan. Sebaliknya apabila pembayaran pajak tersebut banyak kendala maka wajib pajak akan merasa enggan untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

**H3 :** Diduga Pelayanan jasa mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

#### **4. Pengetahuan**

pengetahuan serta pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak.

Menurut Mahmidayeli (2005: 79) pengetahuan adalah salah satu kekuatan yang dapat membentuk sejarah peradapan suatu bangsa, dan bahkan kemajuan suatu masyarkat selalu ditandai dengan ilmu pengetahuan.

Menurut Plato (dalam Mahmidayeli : 2005: 93) pengetahuan adalah adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan fikiran yang ditandai dengan suatu kepastian seperti yang di tunjuk oleh alam serta objek-objeknya.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak bagi kehidupan, baik dalam hal kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan maupun kurangnya pengetahuan tentang arti penting pajak itu sendiri bagi bangsa dan Negara, hal ini membuat masyarakat menunggak dalam pembayaran pajak,

**H4** : Diduga pengetahuan mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## 5. Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (prevantif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Adapun konsep dari sanksi perpajakan menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa:“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan dua macam sanksi (Mardiasmo, 2009 : 57 ), yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang di ancam dengan sanksi administrasi saja, akan tetapi ada juga yang diancam dengan sanksi pidana saja, akan tetapi ada juga yang di ancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Namun lemahnya sanksi yang diterapkan dilapangan membuat masyarakat tidak takut atau tidak peduli terhadap sanksi yang diberikan, hal ini tentu akan membuat masyarakat selalu menunggak pembayaran pajak karena merasa tidak diawasi.

**H5 :** Diduga sanksi mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## **6. Kemampuan Untuk Membayar**

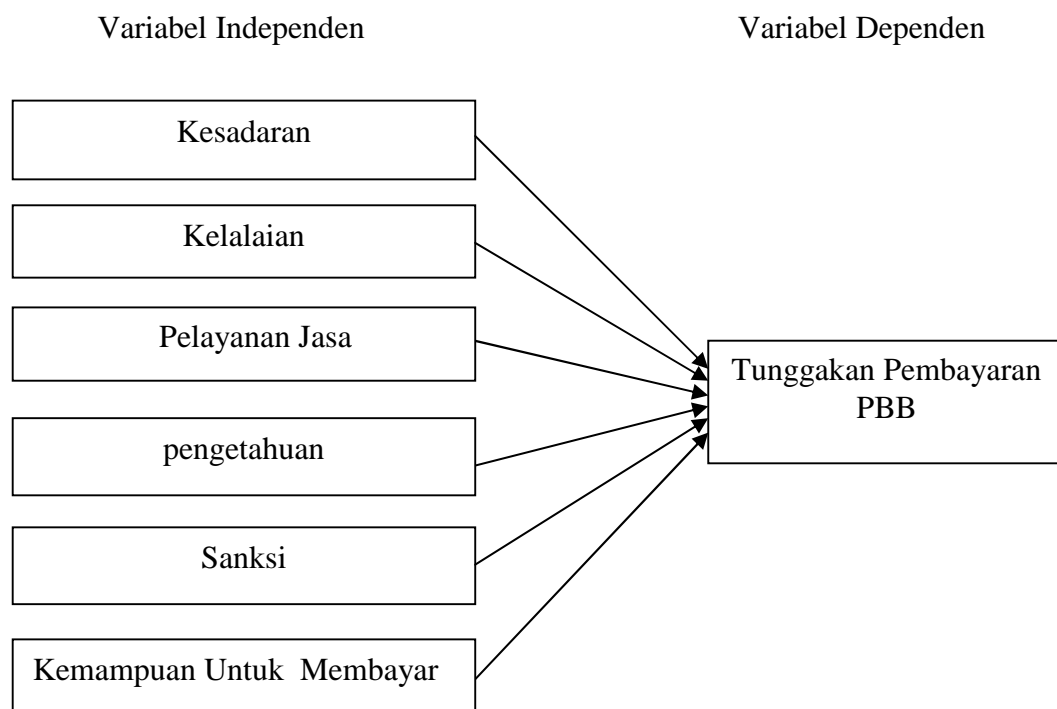
Kekuatan untuk membayar utang kepada Negara biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, kekayaan, serta susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan.

Dari keadaan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan menengah kebawah, banyak membuat masyarakat tidak sanggup untuk membayar pajak. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pajak harus dikenakan pada orang-orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dengan sistem prosedur pemungutan dan pembayaran pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

**H6** : Diduga Kemampuan Untuk Membayar mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

## 2.7. Model Penelitian

**Table II.1**  
**Model Penelitian**



## 2.8. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditentukan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** : Diduga kesadaran mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan

- H<sub>2</sub> : Diduga kelalaian mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan
- H<sub>3</sub> : Diduga pelayanan jasa mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan
- H<sub>4</sub> : Diduga pengetahuan mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan
- H<sub>5</sub> : Diduga sanksi mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan
- H<sub>6</sub> : Diduga kemampuan untuk membayar mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis adalah Kabupaten Siak Sri Indrapura, yang merupakan salah satu dari Kabupaten di Pekanbaru Riau. Kabupaten Siak terdiri dari 14 kecamatan, yaitu Dayun, Sungai Mandau, Minas, Mempura, Sabak auh, Pusako, Bungaraya, Siak, Sungai Apit, Kandis, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Koto gasib dan Tualang. Sedangkan yang menjadi lokasi penelitian adalah di kecamatan bungaraya.

#### **3.2. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Apa pun Populasi dari penelitian ini adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2003 : 73).

Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang bertempat tinggal di kecamatan bungaraya yang berjumlah 6.900 orang.

##### **2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu Dengan

menggunakan teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel diambil dari sebagian jumlah populasi yang di nilai dengan mewakili keseluruhan responden penelitian (Sugiyono,2007: 96).

Sedangkan untuk ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus slovin, dimana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sample populasi. (Dalam Riduan :2005:65) adapun rumus Slovin tersebut adalah :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Nilai Kritis ( Batas Ketelitian) Yang Dinginkan

Tabel penentuan jumlah sampel dari Isaac dan Michael memberikan kemudahan penentuan jumlah sampel berdasarkan tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%. Dengan tabel ini, peneliti dapat secara langsung menentukan besaran sampel berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki.

Besaran atau ukuran sampel ini sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun, dalam hal tingkat kesalahan, pada penelitian sosial maksimal tingkat kesalahannya adalah 5% (0,05). Makin besar tingkat kesalahan maka makin kecil jumlah sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar jumlah sampel



(semakin mendekati populasi) maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya.

Adapun jumlah populasi atau wajib pajak PBB sekecamatan bungaraya dari penelitian ini sebesar 6.900 jiwa , maka dengan besar jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 5% (0,05) dari populasi yang berjumlah 6.900 jiwa terdapat sampel sebanyak :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{6.900}{1+6900 \times (0,05)^2}$$

$$n = \frac{6.900}{1+6.900 \times (0,0025)}$$

$$n = \frac{6.900}{1+17,25}$$

$$n = \frac{6.900}{18,25}$$

$$n = 378,08$$

$$n = 378$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari 6.900 jiwa adalah sebanyak 378 jiwa wajib pajak yang berdomisili di kecamatan bungaraya.

### **3.3. Jenis Penelitian Dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan, responden dari peneliian ini yaitu kepala keluarga yang menjadi wajib pajak.

Adapun data-data yang diperlulukan adalah sebagai berikut :

- a. data tentang responden
- b. data tentang tingkat pembayaran atau kesediaan membayar pajak.

#### **2. Data Skunder**

Data yang penulis peroleh dari kantor-kantor yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun kantor tersebut adalah kantor dispenda, kantor bupati siak, data-data yang dimaksud adalah:

- a. Lokasi penelitian
- b. Keadaan wilayah, penduduk dan tingkat pendidikan masyarakat
- c. Jumlah penduduk
- d. Keadaan sarana dan pra sarana
- e. Data sekunder lainnya yang dianggap perlu bagi penelitian

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dan informasi bagi kepentingan penalitian ini maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

#### **1. Observasi**

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiono, 2006 : 166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses

biologis dan psikologis. Jadi observasi merupakan teknik pengamatan langsung oleh penulis dengan melihat dari dekat gejala-gejala yang ada dilapangan yang menjadi objek penelitian objek penulis

## 2. Interview

Yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah penelitian.

## 3. Kuesioner

Yaitu dengan membuat daftar pertanyaan (angket) yang disusun secara tertulis dan diajukan kepada responden untuk mendapatkan data yang dicari.

### **3.5. Defenisi Variabel Dan Pengukuran Variabel**

Variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri

Data penelitian terdiri atas data primer yang dikumpulkan melalui kuensioner. Yang menjadi variabel dependen adalah Tunggalan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Y) dan variabel Independennya adalah Kesadaran (X1), Kelalaian (X2), Pelayanan Jasa (X3), Pengetahuan (X4), Sanksi (X5) dan Kemampuan Untuk Membayar (X6).

#### **3.5.1. Variabel Dependen (Y)**

Untuk mengukur seberapa besar tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan. maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

### **3.5.2. Variabel Independen (X)**

#### **1. Kesadaran (X1)**

Untuk mengukur seberapa besar kesadaran (X1) mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

#### **2. Kalalain (X2)**

Untuk mengukur seberapa besar kalalain (X2) mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

#### **3. Pelayanan Jasa (X3)**

Untuk mengukur seberapa besar pelayanan jasa (X3) mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel

ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

#### 4. Pengetahuan (X4)

Untuk mengukur seberapa besar pengetahuan (X4) mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

#### 5. Sanksi (X5)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan per Undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (perevatif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Untuk mengukur seberapa besar Sanksi (X5) mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

## 6. Kemampuan Untuk Membayar (X6)

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan untuk membayar (X6) mempengaruhi tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan, maka pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan skala 1 (sangat tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 (netral), skala 4 (setuju), skala 5 (sangat setuju). Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang rendah.

### 3.6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS (Statistical Package For Social Science). Ada beberapa teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 3.6.1. Uji Validitas Dan Realibilitas Data

##### 1. Uji Validitas

Instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Oleh karena itu angket yang digunakan perlu diuji validitasnya. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur data dari variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini mengetahui validitas angket dengan menggunakan rumus *product moment* atau *bivariate Pearson*.

Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  pada taraf signifikan 5% maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (di nyatakan valid),

sebaliknya bila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total / dinyatakan tidak valid.

## 2. Uji Realibilitas

Untuk mengetahui konsistensi alat ukur dilakukan uji reliabilitas. Angket dikatakan reliabel apabila dapat memberikan hasil yang relatif sama saat dilakukan pengukuran ulang pada obyek yang berbeda pada waktu yang berlainan. Pegujian reliabilitas angket menggunakan rumus metode alpha.

Uji signifikansi dilakukan pada taraf signifikan 5% (0,05), artinya instrumen dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari  $r$  kritis *product moment*. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2003: 110-115) uji normalitas bertujuan untuk munguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non parametrik *kolmogorovsmirnov (K-S)*. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal.

#### 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinearitas dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan terdapat hubungan antara variabel independen yang satu dengan variabel

independen yang lain. Diasumsikan bahwa masing-masing variabel X tidak saling berkorelasi linear. Sesungguhnya multikolinearitas itu tetap ada pada setiap variabel independen, hanya saja harus dipastikan apakah multikolinearitas yang ada masih dalam batas penerimaan atau tidak.

Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance inflation* (VIF). VIF merupakan singkatan dari Variance Inflation Factor. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas dan mempunyai angka *tolerance* mendekati satu.

Batas VIF adalah 5, jika VIF dibawah 5 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas dan sebaliknya. (Iman Ghozali,2006)

Ciri-ciri yang sering ditemui apabila model regresi linier kita mengalami multikolinieritas adalah:

1. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi (misal nilainya menjadi lebih besar atau kecil) apabila dilakukan penambahan atau pengeluan sebuah variabel bebas dari model regresi.
2. Diperoleh nilai R-square yang besar, sedangkan koefisien regresi tidak signifikan pada uji parsial.
3. Tanda (+ atau -) pada koefisien model regresi berlawanan dengan yang disebutkan dalam teori (atau logika). Misal, pada teori (atau logika) seharusnya  $b_1$  bertanda (+), namun yang diperoleh justru bertanda (-).
4. Nilai standard error untuk koefisien regresi menjadi lebih besar dari yang sebenarnya (overestimated).



### 3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada priode  $t-1$  (sebelumnya). Jika ada, berarti terdapat autokorelasi dan model regresi dikatakan baik bila terbebas dari autokorelasi.

Menurut Ghozali (2005 : 98) untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan mendeteksi besaran Durbin-Watson dimana: jika angka  $D-W > d_L < (k - d_U)$  berarti tidak terdapat gejala autokorelasi.

### 4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian *variance* dari residual satu pengalaman ke pengalaman lain. Sementara itu dalam situasi terdapatnya heteroskedastisitas, peneliti dapat mengambil kesimpulan yang sama sekali salah karena pengujian  $t$  dan  $F$  sangat mungkin membesarkan signifikansi statistik dari parameter yang ditaksir, sedangkan konsekuensinya dari autokorelasi adalah nilai  $t$  dan  $F$  tidak lagi sah dan jika diterapkan akan memberikan kesimpulan lain yang menyesatkan secara serius mengenai arti statistik dari koefisien regresi yang ditaksir.

### 3.6.3. Uji Hipotesis

#### 1. Metode Regresi Linear Berganda

Adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih dari variabel independen ( $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan

variabel dependen apakah hubungan antara variabel independen atau dependen berhubungan positif atau negatif. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan :

Y = Variabel dependen

$X_1X_2\dots X_n$  = Variabel independen

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

## 2. Uji T

Menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan secara terpisah-pisah untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Uji T dilakukan untuk membandingkan t hitung dengan t tabel pada tingkat signifikan 5% (0,05). Jika t hitung > t tabel maka variabel bebas dapat menerangkan terikatnya. Artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

Kriteria pengujian adalah  $H_0$  diterima apabila t hitung < t tabel.  $H_a$  diterima apabila t hitung > t tabel. Kategori yang digunakan berdasarkan skala likers, dimana responden diminta untuk menjawab pertanyaan dengan nilai jawaban sebagai berikut :

a. Alternatif SS (Sangat Setuju 5)

b. Alternatif S (Setuju 4)

- c. Alternatif N (Netral 3)
- d. Alternatif KS (Kurang Setuju 2)
- e. Alternatif STS (Sangat Tidak Setuju 1).

### 3. Uji F

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen ( $X_1, X_2 \dots X_n$ ) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen ( $Y$ ). (Dwi Priyanto, 2009 : 81)

Dalam Uji F kesimpulan yang diambil adalah yang melihat signifikan ( $\alpha$ ) 5% dengan ketentuan :

$F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  tolak : independen tidak berpengaruh secara simultan kepada dependen.

$F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima : independen berpengaruh secara simultan kepada dependen.

### 4. Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Dalam bahasa sehari-hari Koefisien determinasi adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1. Karakteristik Wilayah**

Kecamatan Bungaraya merupakan pemekaran dari Kecamatan Sungai Apit, yang dimekarkan menjadi dua Kecamatan yaitu Kecamatan Bungraya dan Kecamatan Sungai Apit. Yang dilaksanakana pada tahun 2001 berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Siak No 13 tahun 2001. Adapun desa yang ada dikecamatan Bungaraya berdiri yaitu 10 desa diantaranya: Desa Bungaraya, Jayapura, Jatibaru, Tuah Indrapura, Buatan Lestari, Langsung Permai, Kemuning Muda, Temusai, Suak Merambai Dan Dayang Suri.

Wilayah Kecamatan Bungaraya pada umumnya terdiri dari dataran rendah, bergelombang dan sedikit berbukit dengan struktur tanah yang pada umumnya terdiri dari tanah padsolit merah dan kuning dari batuan dan alluvial, tanah gambut, serta tanah organosol dalam bentuk rawa-rawa dan tanah basah.

Kecamatan Bungaraya terletak antara 0° 39' - 1° 04' LU dan 101° 13' - 102° 13' BT. Dengan luas wilayah keseluruhan adalah 194,49 km<sup>2</sup> dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara : kecamatan Sabak Auh dan Kec. Siak Kecil Kab. Bengkalis
- b. Selatan : Sungai Siak dan Kecamatan Siak
- c. Barat : Kecamatan Sungai Mandau dan Kab. Bengkalis
- d. Timur : Sungai Siak Dan Kecamatan Sabak Auh

## 4.2. Keadaan Demografi

### 4.2.1. Jumlah Penduduk Kecamatan Bungaraya

Penduduk merupakan hal yang penting dalam sebuah pembangunan, baik sebagai objek maupun sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Sebagai mana telah diprioritaskan oleh pemerintah bahwa penduduk merupakan modal dasar pelaksanaan pembangunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk akan memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang akan menggerakkan dan yang digerkan dalam suatu proses pembangunan.

Penduduk dikecamatan bungaraya pada tahun 2011 berjumlah 19.607 jiwa untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Table IV.1**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**  
**Di Kecamatan Bungaraya**

N0	DESA	Jenis kelamin		JUMLAH
		Pria	Wanita	
1	Bungaraya	1.723	1.706	3.432
2	Jayapura	1.401	1.328	2.729
3	Jatibaru	1.481	1.405	2.886
4	Tuah Indrapura	1.486	1.218	2.704
5	Buatan Lestari	1.056	937	1.993
6	Langsat Permai	641	639	1.280
7	Kemuning Muda	1.159	997	2.156
8	Temusai	546	484	1.030
9	Suak Merambai	310	251	561
10	Dayang Suri	446	390	836
<b>JUMLAH</b>		10.429	9.359	19.607

*Sumber : Kantor Camat Bungaraya 2011*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk kecamatan bungaraya dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan jenis kelamin wanita.

#### 4.2.2. Mata Pencarian Penduduk

Adapun penduduk di kecamatan bungaraya meyoritas memiliki mata pencarian sebagai petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel IV.2**  
**Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencarian**  
**Di Kecamatan Bungaraya**

No	Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Bekerja	5.108	27.3
2	Nelayan	1.233	6.6
3	Petani	7.105	38
4	Buruh	2.171	11.6
5	Swasta	2.636	14
6	TNI/POLRI	16	0.08
7	PNS	425	2.6
<b>JUMLAH</b>		<b>459.253</b>	<b>100</b>

*Sumber : kantor kecamatan bungaraya 2011*

#### 4.2.3. Kehidupan Keagamaan

Agama merupakan hak asasi manusia dalam artian manusia bebas untuk memilih agamanya masing-masing. Sebagai mana juga telah diatur dalam undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat 1 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribada menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pada umumnya masyarakat yang berdomisili dikecamatan bungaraya adalah memeluk agama Islam dari jumlah total 19.607 jiwa terdapat 19.320 jiwa memeluk agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel IV.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Menurut Agama**  
**Di Kecmatan Bungaraya**

No	Pemeluk agama	jumlah	persentase
1	Islam	18.870	98.9
2	Kristen	255	1.3
3	Katolik	16	0.09
4	Hindu	0	0
5	Buda	35	0.2
	jumlah	19.067	100

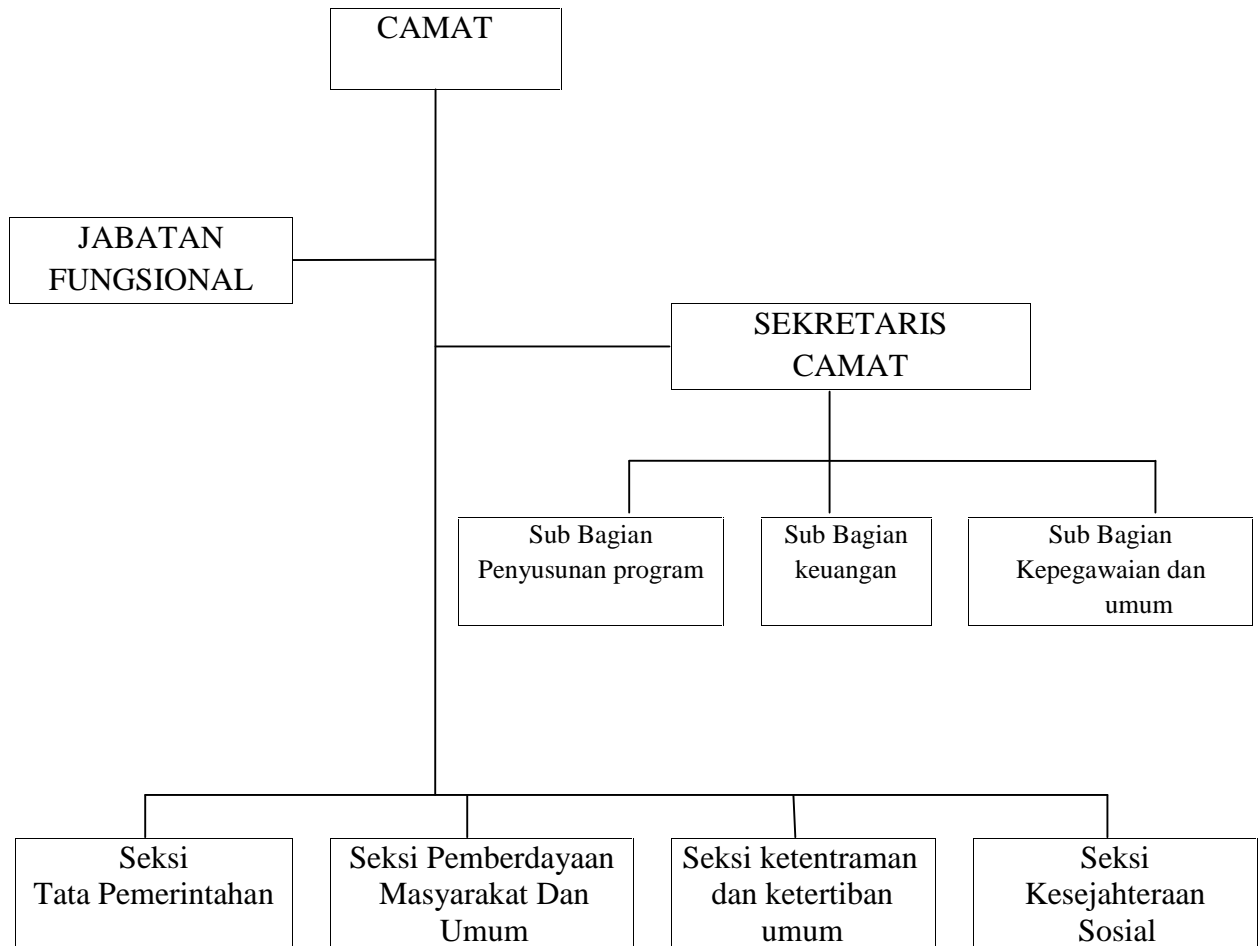
*Sumber : kantor camat bungaraya 2011*

#### **4.3. Struktur Pemerintahan**

Pelaksanaan pemerintah wilayah kecamatan bungaraya telah melaksanakan atau menerapkan pola maksimal berdasarkan peraturan daerah kabupaten siak nomor 9 tahun 2009 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah kabuupaten dan kelurahan kabupaten siak.

Kecamatan bungaraya merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di kabupaten siak adapun mengenai struktur organisasi dari pemerintah kecamatan bungaraya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

**Gambar IV.1**  
**Strutur Organisasi Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak**



*Suber : Kantor Kecamatan Bungaraya 2011*

#### **4.4. Tugas Dan Fungsi Camat**

Dalam undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota dibentuk diwilayah kabupaten/kota dengan perda berpedoman pada peraturan pemerintah.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas camat mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat



2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertipan umum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan aturan perundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggara kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan

#### **4.5. Tugas Dan Fungsi Perangkat Kecamatan**

##### **4.5.1. Sekrestaris Camat**

1. Menyusun rencana, melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian keuangan, umum, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut sekretaris camat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Melaksanakan urusan umum
  - b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian
  - c. Melaksanakan urusan administrasim keuangan
  - d. Melaksanakan urusan urusan perlengkapan
  - e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat

#### 4.5.2. Seksi Tata Usaha

1. Seksi tata pemerintahan yang mempunyai tugas membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang pemerintah
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi tata pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun program dan seksi tata pemerintahan
  - b. Menyenggarakan penilaian lomba kelurahan tingkat kecamatan
    - 1) Menyenggarakan fasilitasi kerjasama antar kelurahan dan menyelesaikan perselisihan antar kelurahan
    - 2) Elaksanakan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil, inventariansasin aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada diwilayahnya
    - 3) Menillai prestasi kerja bawahan untuk membina karir
    - 4) Merencanakan dan menyusun serta menyelenggarakan program-program kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat lintas kelurahan dalam tugas kelurahan
    - 5) Mempersiapkan bahan dan data untuk menyelenggarakan pemilihan umum
    - 6) Mempersiapkan bahan dan data untuk meningkatkan pertisipasi politik masyarakat lintas kelurahan
    - 7) Melaksanankan pembinaan keagrarian dalam rangka tertib pertanahan

- 8) Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
- 9) Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat

#### **4.5.3. Saksi Pemberdayaan Masyarakat**

1. Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi pemberdayaan manusia memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun program dan kegiatan
  - b. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa
  - c. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - d. Membantu koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa serta menjaga dan memelihara sarana dan prasarana diwilayah kelurahan
  - e. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perekonomian
  - f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayahnya
  - g. Mengkoordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam wilayah kecamatan

- h. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah pembangunan temu karya unit daerah kerja pembangunan
- i. Merencanakan dan menyusun program pelaksanaan kegiatan perekonomian dan usaha kecil masyarakat lintas kelurahan
- j. Melaksanakan pemantauan, evaluasi kelancaran produksi dan distribusi barang-barang kebutuhan masyarakat
- k. Membantu instansi terkait dalam menata dan pemuktahiran data masyarakat miskin
- l. Memfasilitasi pembinaan organisasi kepemudaan dan olah raga lintas kelurahan
- m. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, pemberian bantuan sarana dan prasarana rumah ibadah
- n. Mengkoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana alam
- o. Mengkoordinasikan bimbingan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
- p. Memfasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan kesehatan
- q. Melaksanakan pembinaan kegiatan peningkatan partisipasi dan peranan wanita
- r. Memberi saran dan pertimbangan kepada camat
- s. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

#### **4.5.5. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban**

1. Seksi ketentraman dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok membantu camat dalam membina , mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum
2. Untuk melaksanakan tugasnya seksi Seksi ketentraman dan ketertiban memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja serta kegiatan
  - b. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban, ideologi, kesatuan bangsa serta kemasyarakatan
  - c. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum dengan mengkoordinasi aparat keamanan yang terkait dalam wilayah kecamatan
  - d. Menyelenggarakan fasilitasi partisipasi masyarakat dan pembinaan rukun warga dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum
  - e. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan kerukunan antar umat beragama
  - f. Membantu satuan polisi pamong praja dalam menegakkan dan melaksanakan peraturan daerah keputusan bupati serta perundang-undangan
  - g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat
  - h. Membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh camat.

#### **4.5.6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

1. Tugas pokok membantu camat dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang pemberian kesejahteraan sosial kepada masyarakat
2. Untuk menyelenggarakan tugasnya seksi kesejahteraan masyarakat memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja sebagai pedoman
  - b. mengolah, merumuskan dan mengevaluasi program yang terkait dengan kesejahteraan rakyat
  - c. Memfasilitasi kegiatan perkoperasian, dunia usaha, perdagangan dan perbankan
  - d. Mendorong dan memberdayakan kelompok-kelompok tani dan peternak
  - e. Melayani dan memberdayakan organisasi keagamaan, PKK dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya
  - f. Mendorong dan memberdayakan organisasi profesi
  - g. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan kesejahteraan pada sekretaris camat
  - h. Menilai hasil kerja bawahan dengan cara mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas
  - i. Menilai prestasi kerja bawahan untuk pembinaan karir

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Kuesioner Dan Demografi

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yaitu secara langsung (*personally administred questionnaires*). Jumlah kuesioner yang disebar adalah sejumlah 350, jumlah kuesioner yang kembali sejumlah 250, dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sejumlah 220. Jadi tidak semua kuesioner yang kembali dapat diolah hal ini disebabkan banyaknya kecacatan dalam pengisian kuesioner. Adapun tingkat pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel V.1 berikut :

**Tabel V.1**  
**Tingkat Pengembalian Kuesioner**

No	Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
1	Jumlah kuesioner yang disebar	350	100
2	Jumlah kuesioner yang kembali	250	71.43
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	100	28.57
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	220	62.86

*Sumber : Data Olahan Penelitian*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar adalah berjumlah 350 kuesioner dengan persentase 100%, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 250 kuesioner dengan persentase 71.43%, dan jumlah kuesioner yang tidak kembali berjumlah 100 kuesioner dengan persentase 28.57%. dan jumlah kuesioner yang dapat diolah sejumlah 220 kuesioner dengan persentase 62.86%.

Gambaran umum dari hasil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

**Tabel V.2**  
**Demografi Responden**

Deskripsi	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	195	78
2. Perempuan	55	22
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
Umur		
1. < 30 tahun	97	38.8
2. Antara 30 sampai 40	125	50
3. Antara 41 sampai 50	30	12
4. Diatas 50 tahun	3	1.2
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>100</b>
Pekerjaan		
1. PNS	27	10.8
2. Wiraswasta	68	27.2
3. Buruh	115	46
4. IRT	40	16
<b>Total</b>	<b>220</b>	<b>100</b>

*Sumber : Data Olahan Penelitian*

## **5.2. Analisis Data dan Statistik Deskriptif Variabel**

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihatkan dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, nilai maksimum dan minimum (Ghozali, 2005 : 90). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak bumi dan bangunan. Statistik deskriptif penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini :



**Table V.3**  
**Hasil Uji Ststistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran	220	15	23	19.32	1.437
Kelalaian	220	15	22	19.44	1.408
Pelayanan	220	15	23	19.47	1.416
Pengetahuan	220	15	23	19.40	1.478
Sanksi	220	15	49	19.35	2.497
Kemampuan Membayar	220	15	23	19.43	1.351
Tunggakan PBB	220	16	23	19.84	1.246
Valid N (listwise)	220				

*Sumber : Olahan Data Spss*

Data Hasil statistik dapat dilihat bahwa yang merupakan variable independen seperti faktor Kesadaran dengan nilai rata-rata jawaban responden 19.32 dan diperoleh standar deviasi untuk kesadaran 1.437, kelalaian dengan nilai rata-rata jawaban responden 19.44 dan diperoleh standar deviasi 1.408, pelayanan dengan nilai rata-rata jawaban responden 19.47 dan diperoleh standar deviasi 1.416, sanksi dengan nilai rata-rata jawaban responden 19.35 dan diperoleh standar deviasi 2.497, kemampuan untuk membayar dengan nilai rata-rata jawaban responden 19.34 dan diperoleh standar deviasi 1.351, dan tunggakan Pajak bumi dan bangunan merupakan variabel dependen mempunyai nilai rata-rata jawaban responden adalah 19.84 diperoleh standar deviasi 1.246. Dilihat dari nilai rata-ratanya, variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan memiliki rata-rata paling tinggi dibandingkan dengan variabel lain.

### 5.3. Analisis Data

#### 5.3.1. Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument dalam kuesioner harus diuji kualitas datanya atau syarat yang penting yang berlaku dalam kuesioner seperti: keharusan suatu kuesioner untuk valid dan reliabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut valid atau reliabel yang akan diukur, sehingga penelitian ini bisa mendukung hipotesis.

Dalam pengujian yang peneliti lakukan untuk mengetahui kualitas data, layak atau tidaknya suatu data untuk diangkat, maka peneliti menganalisis data dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item pernyataan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Dan pengujian validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Bivariate Pearson* (Produk Momen Pearson) dan dilakukan dengan *one shot method*, yaitu metode yang dilakukan sekali pengukuran untuk menguji validitas dari instrumen penelitian (Ghozali, 2002:25). Kuesioner dapat dikatakan valid jika nilai *pearson Korelation* lebih besar dari nilai *r* tabel, *r* tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data ( $n = 220$ ), maka *r* tabelnya adalah 0.132.

Sedangkan penulis melakukan pengukuran reliabilitas dengan menggunakan teknik *Cronbach's Alpha* guna menguji kelayakan terhadap

konsistensi seluruh skala yang digunakan. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode *Cronbach Alpha* menggunakan SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* >0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghazali, (2006). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode *one shot* atau diukur sekali saja.

**Table V.4**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Kesadaran**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Kesadaran			0,674	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.291	Valid		
Pertanyaan 2	0.556	Valid		
Pertanyaan 3	0.649	Valid		
Pertanyaan 4	0.564	Valid		
Pertanyaan 5	0.482	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.4 dapat dijelaskan bahwa kesadaran membayar pajak diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel kesadaran valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,674 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**TableV.5**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Kelalaian**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Kelalaian			0,659	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.304	Valid		
Pertanyaan 2	0.536	Valid		
Pertanyaan 3	0.514	Valid		
Pertanyaan 4	0.567	Valid		
Pertanyaan 5	0.540	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.5 dapat dijelaskan bahwa kelalaian membayar pajak diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel kelalaian valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,659 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**Table V.6**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Pelayanan**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Pelayanan			0,646	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.267	Valid		
Pertanyaan 2	0.481	Valid		
Pertanyaan 3	0.556	Valid		
Pertanyaan 4	0.554	Valid		
Pertanyaan 5	0.529	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.6 dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel pelayanan valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,646 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**Table V.7**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Pengetahuan**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Pengetahuan			0,653	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.346	Valid		
Pertanyaan 2	0.443	Valid		
Pertanyaan 3	0.518	Valid		
Pertanyaan 4	0.496	Valid		
Pertanyaan 5	0.577	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.7 dapat dijelaskan bahwa pengetahuan membayar pajak diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel pengetahuan valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,653 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**Table V.8**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Sanksi**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Sanksi			0,630	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.261	Valid		
Pertanyaan 2	0.339	Valid		
Pertanyaan 3	0.318	Valid		
Pertanyaan 4	0.861	Valid		
Pertanyaan 5	0.316	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.8 dapat dijelaskan bahwa sanksi yang diberikan oleh dinas pajak diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel Sanksi valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,630 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**Table V.9**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Kemampuan Untuk Membayar**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Kemampuan Untuk Membayar			0,672	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.396	Valid		
Pertanyaan 2	0.578	Valid		
Pertanyaan 3	0.530	Valid		
Pertanyaan 4	0.587	Valid		
Pertanyaan 5	0.446	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.9 dapat dijelaskan bahwa kemampuan untuk membayar wajib pajak diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel kemampuan untuk membayar valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,672 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

**Table V.10**  
**Hasil Uji Validitas dan Reabilitas Tunggakan PBB**

Item Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	<i>pearson Correlation</i>	<i>Kesimpulan</i>	<i>Conbach Alpha</i>	<i>Kesimpulan</i>
Tunggakan PBB			0,622	<i>Reliabel</i>
Pertanyaan 1	0.234	Valid		
Pertanyaan 2	0.573	Valid		
Pertanyaan 3	0.553	Valid		
Pertanyaan 4	0.455	Valid		
Pertanyaan 5	0.463	Valid		

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.10 dapat dijelaskan bahwa tunggakan pajak bumi dan bangunan diukur dengan 5 item pertanyaan . Hasil uji validitas menunjukkan bahwa item 1,2,3,4,5, memiliki nilai lebih besar dari 0,132 sehingga valid. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada variabel tunggakan pajak bumi dan bangunan valid. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai koefisien alpha adalah 0,622 yang berarti variabel tersebut reliabel karena memiliki nilai koefisien alpha diatas 0,60 (Ghozali, 2006).

#### 5.4. Uji Asumsi Klasik

Setelah data yang dapat dianggap valid atau reliabel, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing – masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

##### 5.4.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti untuk keseluruhan indikator dan variabel tersebut bersifat normal. Uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov-smirnov*.

**Table V.11**  
**Hasil Uji Normalitas K-S-Z Tes**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Kesadaran	Kelalaian	Pelayanan	Pengetahuan	sanksi	Kemampuan	Tunggakan PBB
N		220	220	220	220	220	220	220
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	18.32	19.44	19.47	19.40	19.35	18.43	19.84
	Std. Deviation	1.437	1.408	1.416	1.416	1.497	1.351	1.246
Most Extreme Differences	Absolute	.143	.165	.156	.149	.149	.160	.189
	Positive	.141	.140	.150	.130	.128	.146	.137
	Negative	-.103	-.094	-.146	-.145	-.149	-.131	-.173
Kolmogorov-Smirnov Z		1.512	1.677	1.442	1.029	1.646	.918	.997
Asymp. Sig. (2-tailed)		.021	.007	.032	.241	.006	.368	.274

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Olahan Data SPSS

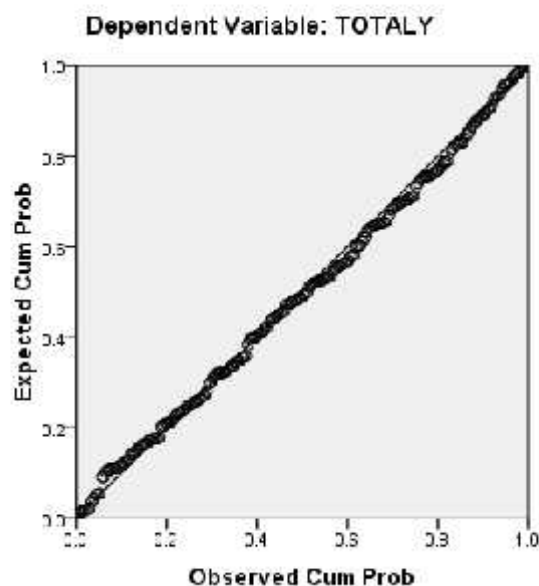
Tabel V.11 menunjukkan nilai K-S-Z untuk variabel independen variabel kesadaran sebesar 1.512 dengan signifikan sebesar 0,021, Nilai K-S-Z untuk variabel kelalaian adalah sebesar 1.677 dengan nilai signifikan



sebesar 0,007, Nilai K-S-Z untuk variabel pelayanan adalah 1.442 dengan nilai signifikan sebesar 0,032, Nilai K-S-Z untuk variabel pengetahuan adalah sebesar 1.029 dengan nilai signifikan 0,241, nilai K-S-Z untuk variabel sanksi adalah sebesar 1.646 dengan nilai signifikan sebesar 0.006. Nilai K-S-Z untuk variabel kemampuan untuk membayar adalah sebesar 918 dengan nilai signifikan 0,274, sedangkan untuk variable dependen tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan nilai K-S-Z adalah sebesar 998 dan nilai signifikan 0.274. Maka dapat dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel secara statistik telah berdistribusi secara normal dan layak digunakan sebagai data penelitian.

**Gambar V.1**  
**Diagram P-P Plot Normalitas**

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**



*Sumber : Olahan Data SPSS*

Pada gambar V.12 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi normal dapat melihat grafik normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik (Santoso, 2004).

#### 5.4.2. Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari besaran nilai *Durbin-Watson* (DW). Kriterianya sebagai berikut:

- Jika D-W di bawah -2 berarti tidak ada autokorelasi positif
- Jika D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi
- Jika D-W di atas +2 berarti ada Autokorelasi negatif.

**Table V.12**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.791 <sup>a</sup>	.626	.615	.773	1.616

a. Predictors: (Constant), kemampuan, sanksi, kelalaian, kesadaran, pelayanan, pengetahuan

b. Dependent Variable: tunggakan

Sumber: Olahan Data SPSS

Pada tabel V.9 terlihat semua variabel mempunyai nilai Durbin Watson dibawah 2 dan diatas -2 yaitu sebesar 1.616 yang berarti tidak ada autokorelasi dan dapat diisimpulkan bahwa regesi ini baik karena bebas dari autokorelasi.

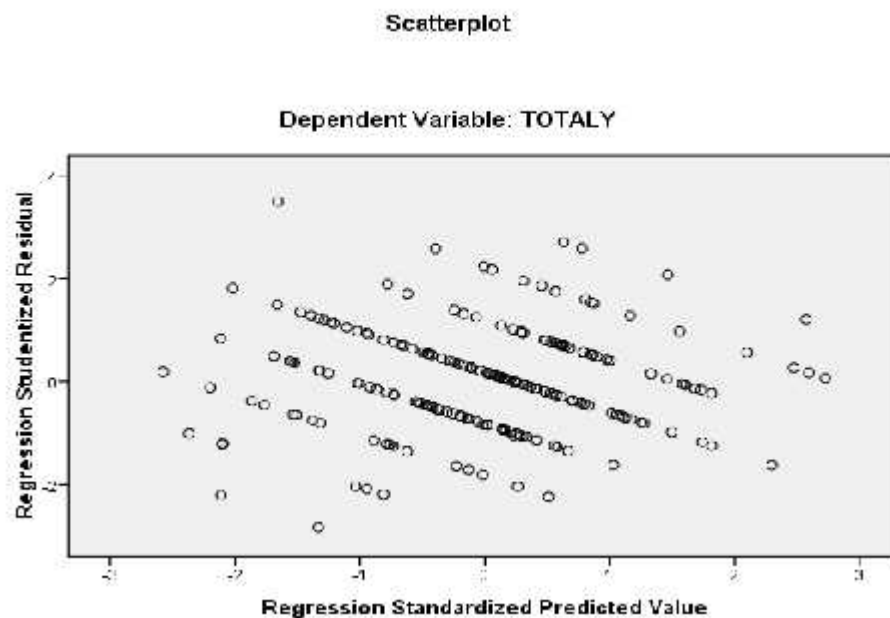
### 5.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Metode yang digunakan dalam mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara melihat grafik plot prediksi variabel dependen, yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dengan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di-studentized. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji plot dapat disimpulkan sebagai berikut:

**Gambar V.2**  
**Diagram Scatterplot**



*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari gambar V.14 diatas, terlihat titik menyebar secara acak atau tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas dan tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti model regresi layak untuk memprediksikan variabel dependen berdasarkan masukan variabel independen.

Dari hasil uji asumsi klasik terhadap variabel-variabel independen diatas, dapat disimpulkan bahwa data-data diatas lolos dari uji asumsi klasik dan uji kualitas data dan data diatas bisa dipakai pada proses selanjutnya, yaitu pada pengujian hipotesis.

#### 5.4.4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dengan menggunakan VIF paling banyak dilakukan dalam penelitian di Indonesia. Asumsi Multikolinearitas terpenuhi jika nilai VIF pada Output SPSS dibawah 10. Karena  $VIF = 1$  Maka asumsi bebas Multikolinearitas juga dapat ditentukan jika tolerance diatas 0,5 . Hasil uji multikolinearitas seperti pada tabel V.15 berikut :

**Table V.13**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

No	Variabel	Tolerance	VIF	Asumsi	Keterangan
1	Kesadaran	0.713	1.402	VIF/Tolerance	Bebas
2	Kelalaian	0.559	1.778	VIF/Tolerance	Bebas
3	Pelayanan	0.638	1.566	VIF/Tolerance	Bebas
4	Pengetahuan	0.571	1.752	VIF/Tolerance	Bebas
5	Sanksi	0.887	1.227	VIF/Tolerance	Bebas
6	Kemampuan Untuk Membayar	0.654	1.529	VIF/Tolerance	Bebas

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Dari tabel V.15 diatas,dapat dilihat bahwa variabel independen mempunyai nilai toleran jauh diatas 0,5 ( $>5\%$ ), serta nilai VIF tiap variabel independen kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ), sehinggabisa disimpulkan bahwa antara variable independen tidak terjadi multikolonearitas dan layak digunakan sebagai penelitian.

## 5.5. Analisis Hasil Regresi

**Table V.14**  
**Hasil Regresi Linier Berganda**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	1.847	.972
	kesadaran	.159	.043
	kelalaian	.243	.050
	pelayanan	.195	.046
	pengetahuan	.152	.047
	sanksi	.054	.022
	kemampuan	.123	.048

a. Dependent Variable: tunggakan PBB

*Sumber : Olahan Data SPSS*

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut :

$$Y = a + {}_1X_1 + {}_2X_2 + {}_3X_3 + {}_4X_4 + {}_5X_5 + {}_6X_6 + e.....$$

$$Y = 1.847 + 0.159X_1 + 0.243X_2 + 0.195X_3 + 0.152X_4 + 0.054X_5 + 0.123X_6$$

1. Nilai konstanta sebesar 1.847, menyatakan bahwa jika variabel independen tetap atau bernilai nol maka variabel dependen adalah sebesar 1.847 dianggap konstan.
2. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_1$  menunjukkan nilai variabel kesadaran sebesar 0.159, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan kesadaran akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 15,9%.

3. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_2$  menunjukkan nilai variabel kelalaian sebesar 0.243, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan kelalaian akan meningkatkan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 24,3%.
4. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_3$  menunjukkan nilai variabel pelayanan sebesar 0.195, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pelayanan akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 19,5%.
5. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_4$  menunjukkan nilai variabel pengetahuan sebesar 0.152, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif yang berarti setiap peningkatan 1 satuan pengetahuan akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 15,2%.
6. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_5$  menunjukkan nilai variabel sanksi sebesar 0.54, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan sanksi akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 54%.
7. Melalui perhitungan hasil regresi  $X_6$  menunjukkan nilai variabel kemampuan membayar sebesar 0.123, hal ini menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, yang berarti setiap peningkatan 1 satuan kemampuan untuk membayar akan meningkatkan untuk melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan sebesar 12.3%.

### 5.5.1. Uji Persial ( Uji T )

Uji t digunakan untuk menguji dan membandingkan rata nilai suatu sampel dengan nilai lainnya. Uji dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara persial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan dengan tingkat signifikan sebesar 0,5% dengan degree of freedom (df)  $n-k$  membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  maka  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima.

Pembuktiaan hipotesis secara persial dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel bebas mana yang dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel V.17 berikut :

$$\begin{aligned}
 t_{tabel} &= n - k - 1 \\
 &= 220 - 6 - 1 \\
 &= 213 \\
 t_{tabel} &= 1.971
 \end{aligned}$$



**Table V.15**  
**Hasil Regresi Secara Parsial**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.847	.972		1.900	.059
Kesadaran	.159	.043	.183	3.698	.000
Kelalaian	.243	.050	.275	4.904	.000
Pelayanan	.195	.046	.222	4.229	.000
Pengetahuan	.152	.047	.180	3.252	.001
Sanksi	.054	.022	.108	2.436	.016
Kemampuan Untuk Membayar	.123	.048	.133	2.573	.011

a. Dependent Variable: tunggakan

Sumber : Olahan Data SPSS

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel V.17 diatas maka dilakukan perbandingan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  pada signifikan 5% dengan asumsi sebagai berikut:

1. Jika signifikan  $< 0,05$  maka hipotesis diterima
2. Jika signifikan  $> 0,05$  maka hipotesis ditolak

Berdasarkan asumsi diatas hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat disimpulkan bahwa hipotesis untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>: Kesadaran Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel kesadaran diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $2.794 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai

signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_1$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Suhaeni (2010), Merri Nugraheni (2010) , Yeni Apriana (2008), Nila Yuliana Wati (2011) dan Pardi (2009). yang menemukan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

Tingginya kesadaran harus ditumbuhkan dalam menjalankan sistem *self assesment*, karena sistem *self assesment* lebih mengutamakan pada kepatuhan sukarela. Dimana kepatuhan sukarela ini adalah produk dari sikap mental yang didalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran secara terus menerus dan aktif. Jadi dengan diterimanya hipotesis kesadaran dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.

## **H<sub>2</sub>: Kelalaian Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel kelalaian diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $4.904 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_2$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kelalaian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Taufik (2009) ,Suhaeni (2010), Merri Nugraheni (2010) ,dan Zameira Saputri (2008). yang

menemukan bahwa kelalaian berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

**H<sub>3</sub>: Pelayanan Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel pelayanan diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $4.229 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan sebesar  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka H<sub>3</sub> diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Suhaeni (2010), Nila Yuliana Wati (2011), Merri Nugraheni (2010) ,dan Zameira Saputri (2008). yang menemukan bahwa pelayanan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

**H<sub>4</sub>: Pengetahuan Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel pengetahuan diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $3.252 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan sebesar  $0.001 < 0.05$  atau 5% maka H<sub>4</sub> diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Zameira Saputri (2008), dan Nila Yuliana Wati (2011). Yang menemukan bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap tunggakan pajak bumi dan bangunan.

**H<sub>5</sub>: Sanksi Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggalan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel sanksi diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $2.436 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan sebesar  $0.016 < 0.05$  atau 5% maka H<sub>5</sub> diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggalan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Yeni Apriana (2008), dan Taufik (2009) .Yang menemukan bahwa sanksi berpengaruh signifikan terhadap tunggalan pajak bumi dan bangunan.

**H<sub>6</sub>: Kemampuan Untuk Membayar Mempunyai Pengaruh Terhadap Tunggalan Pajak Bumi Dan Bangunan**

Berdasarkan tabel V.17 hasil uji regresi Variabel kemampuan untuk membayar diperoleh nilai koefisien  $t_{hitung}$  sebesar  $2.573 > t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan sebesar  $0.011 < 0.05$  atau 5% maka H<sub>6</sub> diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggalan Pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Suhaeni (2010), Nila Yuliana Wati (2011) dan Taufik (2009). Yang menemukan bahwa kemampuan untuk membayar wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tunggalan pajak bumi dan bangunan.

### 5.5.2. Uji Simultan ( Uji F )

Hasil uji uji F dapat dilihat pada tabel V.18 dibawah ini :

**Table V.16**  
**Hasil Uji F Hitung**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	212.891	6	35.482	59.407	.000 <sup>a</sup>
	Residual	127.218	213	.597		
	Total	340.109	219			

a. Predictors: (Constant), kemampuan, sanksi, kelalaian, kesadaran, pelayanan, pengetahuan

b. Dependent Variable: tunggakan

*Sumber : Olahan Data SPSS*

$$\begin{aligned}
 F_{\text{tabel}} &= n - k - 1 \\
 &= 220 - 6 - 1 \\
 &= 213 \\
 F_{\text{tabel}} &= 2.14
 \end{aligned}$$

Berdasarkan tabel V.18 hasil uji regresi kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar diperoleh nilai koefisien  $F_{\text{hitung}}$  sebesar 59.404 >  $F_{\text{tabel}}$  sebesar 2.14 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  atau 5% kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar maka  $H_1$  diterima. Maka model regresi menunjukkan bahwa secara bersama kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.

### 5.5.3. Koefisien Determinasi

Nilai R (koefisien determinasi) terlihat pada tabel V.19 dibawah ini :

**Table V.19**  
**Hasil Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.791 <sup>a</sup>	.626	.615	.773	1.616

b. Dependent Variable: tunggakan

a. Predictors: (Constant), kemampuan, sanksi, kelalaian, kesadaran, pelayanan, pengetahuan

Sumber : Olahan Data SPSS

Tabel diatas menunjukkan nilai rata-rata R sebesar 0,791, berarti hubungan keeratan secara bersama-sama antara variabel dependen dan independen cukup kuat karena R lebih dari 0,5. Nilai  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,626 artinya 62.6% Wajib Pajak yang melakukan tunggakan Pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar . Sedangkan sisanya sebesar 37.5% dipengaruhi sebab-sebab lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti jarak tempat tinggal wajib pajak, pendidikan serta sarana dan prasarana serta faktor lainnya.

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1. Kesimpulan**

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi serta kemampuan untuk membayar wajib pajak terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien kesadaran  $t_{hitung}$  sebesar 3.698 >  $t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_1$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.
2. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien kelalaian  $t_{hitung}$  sebesar 4.904 >  $t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_2$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kelalaian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan .
3. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien pelayanan  $t_{hitung}$  sebesar 4.229 >  $t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_3$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan mempunyai pengaruh terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.

4. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien pengetahuan  $t_{hitung}$  sebesar 3.252  $> t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.001 < 0.05$  atau 5% maka  $H_4$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak mempunyai pengaruh terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.
5. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien sanksi  $t_{hitung}$  sebesar 2.436  $> t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.016 < 0.05$  atau 5% maka  $H_5$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi mempunyai pengaruh terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.
6. Berdasarkan tabel V.17 diperoleh koefisien kemampuan untuk membayar  $t_{hitung}$  sebesar 2.573  $> t_{tabel}$  sebesar 1.971 dengan nilai signifikan  $0.011 < 0.05$  atau 5% maka  $H_6$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan untuk membayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan .
7. Berdasarkan tabel V.18 diperoleh nilai koefisien  $F_{hitung}$  sebesar 59.407  $> F_{tabel}$  sebesar 2.14 dengan nilai signifikan  $0.000 < 0.05$  atau 5% maka  $H_7$  diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama kesadaran, kelalaian, pelayanan, pengetahuan, sanksi serta kemampuan untuk membayar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tunggakan Pajak bumi dan bangunan.



## **1.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut, bagi petugas pajak dan bagi masyarakat umum:

1. Diharapkan kepada masyarakat Wajib Pajak mempunyai rasa kesadaran yang tinggi dalam membayar Pajak bumi dan bangunan.
2. Kepada Dinas Pendapatan Daerah agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat merasa puas dan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan.
3. Dispenda perlu meningkatkan pengawasan pemungutan Pajak bumi dan bangunan dengan menambah jumlah petugas dilapangan sehingga kebocoran dalam pemungutan pajak dapat dihindari.
4. Dispenda perlu mensosialisasikan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang taat Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi. 2003. *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawab Dan Kasus*, PT. RajaGrafindo : Yogyakarta
- Alma Bohari. 2002. *Manajemen Pemasaran dan Jasa*, AlfaBeta: Bandung.
- Alqur'an Surah Al-Baqarah Ayat : 195.
- Alqur'an Surah At-Taubah Ayat : 29.
- Boediono. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Bohari. 2010. *Pengantar Perpajakan*, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Dwi Priyatno, 2009, *Mandiri Belajar SPSS*, PT. Mediakom : Yogyakarta.
- Ernie Trisnawati Sule, Kurniawan Saefullah. 2005. Edisi pertama. *Pengantar Manajemen*, Kencana: Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Edisi IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar: Surabaya.
- Irianto, SE, 2005, *Politik Perpajakan Membangun Demokrasi Negara*, UII Press ; Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Perpajakan*, Andi ; Yogyakarta.
- ,2009, *Perpajakan*, Edisi Revisi, CV. Andi Offset ; Yogyakarta.
- Markus,Muda, 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Merri Nugraheni, 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Muhmidayeli, 2005. *Filsafat Pendidikan Islam*, LSFK2P: Pekanbaru.

- Nasution , 2004. *Sosiologi Pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Nila Yulianawati Wati, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*, *Dinamika Keuangan Dan Perbankan* Vol,3, No.1 (November) Hal.126-142.
- Pandiangan, Liberty, 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*, Erlanagga : Jakarta.
- Pardi, 2009. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Disurakata*. *Jurnal Akuntabilitas* Vol 5 (Agustus).
- Prastowo, Yustinus. 2009. *Panduan Lengkap Pajak*, Raih Asa Sukses: Jakarta.
- Pudyatmoko, Sri , 2002. *Penganter Hukum Pajak*, Aditya Medya : yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2005. *Perpajakan Teori Dan Kasus*, Salemba Empat : Jakarta.
- Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*, Alfabeta : Bandung.
- Santoso, Singgih, 2004, *Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Cetakan Keempat, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta.
- Setiawan, Agus.2005. *Perpajakan Umu*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Siagaan, Sondang, 2005. *Administrasi pembangunan*, Jakarta : PT. Bumi Aksa
- Siti Kurnia dan Eli Suhayati, 2010. *Perpajakan teori dan teknis perhitungan*, Graham Ilmu : Yogyakarta
- Sugiyono, 2007, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sehaini,2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Sukirno, Sadono, 2006. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Kencana : Jakarta.
- Taufik, (2009). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dikabupaten Rokan Hilir*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Tjiptono, Fandy. 2002. *Manajemen Jasa*. Andika: Yogyakarta.

- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia, Buku 1 Dan 2*, Salemba Empat ; Jakarta.
- Wirawan B. Ilyas , 2004. *Hukum Pajak, Edisi Revisi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Yeni Apriyana, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan* . Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Zameira Saputri, 2008. *Fkctor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis* . Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau